

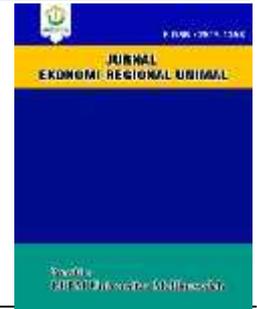
## PENGARUH PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TERHADAP KEMISKINAN DI PAPUA

Marlina<sup>\*a</sup>, Umaruddin Usman<sup>\*b</sup>

\*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

a Corresponding author: [wmarlina@gmail.com](mailto:wmarlina@gmail.com)

b [umaruddin@unmal.ac.id](mailto:umaruddin@unmal.ac.id)



### ARTICLE INFORMATION

### ABSTRACT

#### Keywords:

**GRDP, Government Expenditure and Poverty**

*The purpose of this study was to see the effect of GRDP and Expenditure on the Provincial Government of Papua on Poverty in Papua. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). The data analysis method used in this study is multiple linear regression with the help of the program package eviews 10. The results showed that the GRDP variable has a negative effect on poverty, while the government expenditure variable does not negatively affect poverty, but together the GRDP variable and Government expenditure positively influences poverty in Papua and the magnitude of the effect of GRDP variable and government expenditure on poverty is 0.6966 (69.66%). Recommendations, it is expected that the local government of Papua can increase the GRDP which will be able to minimize poverty in Papua.*

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Papua salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup maksimal dalam bidang sektro pertambangan. Perekonomian provinsi Papua saat ini 50% dibantu oleh sektor pertambangan tersebut. 2,5 miliar ton didalamnya yaitu batuan biji emas dan tembaga yang dapat membantu ekonomi daerah tersebut, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freport. Provinsi Papua memiliki SDA terbanyak sesuai penjelasan sebelumnya seharusnya dapat membantu melancarkan kegiatan ekonomi di provinsi tersebut, namun berbeda dengan kenyataan yang ada, bahwasanya provinsi Papua menjadi provinsi yang paling belakang dan terbanyak angka tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut karena dapat dilihat angka kemiskinan pada tahun 2019. Penduduk miskin di provinsi Papua yakni mencapai 27,74% dari populasi. Indonesia ada kurang lebih 74 ribu desa/wilayah. Diantara desa/wilayah tersebut 18% atau 18.126 desa/wilayah termasuk wilayah tertinggal, yang besar di kawasan Indonesia timur. Ketertinggalan tersebut membuat angka kemiskinan di daerah-daerah tersebut tinggi (BPS Indonesia, 2018).

Angka PDRB di Provinsi Papua mengalami naik turun atau terjadi secara fluktuatif selama 8 tahun bahwa selama 3 tahun dari tahun 2010

sampai 2012 terjadipengurangan dan kembali meningkat 5 tahun sebelumnya PDRB Papua terus mengalami peningkataan kembali, hal ini dikarenakan pemerintah Pusat telah berkontribusi tentang perusahaan *Free port* terbesar di provinsi Papua bahwa hasil pembagian batu bara yang dilakukan harus dibagi sama rata, atau cenderung provinsi Papua atau Indonesia harus lebih banyak memperoleh keuntungan.

Kemudian untuk pengeluaran pemerintah bahwa angka pengeluaran di provinsi Papua selalu meningkat selama 8 tahun terakhir, pengeluaran pemerintah di provinsi selama 8 tahun terakhir ini meningkat dikarenakan pemerintah sudah berkontribusi untuk membangun kesejahteraan dengan membangun infrastruktur-infrastruktur di provinsi Papua dan serta pembangunan di daerah pelosok. Dengan adanya pengeluaran pemerintah yang dilakukan dengan signifikan maka kemiskinan di provinsi selama 8 tahun tersebut menurundengancukupbaik.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan bahwa (Ratih, 2017) dengan judul pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali bahwa semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2015) dengan judul pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Dama, 2016) dengan judul pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Untuk melihat perkembangan dan fenomena yang terjadi pada angka PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan di Provinsi selama kurun waktu 8 tahun di Provinsi Papua sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Angka PDRB,**  
**Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan**

Tahun	PDRB Di Provinsi Papua (Rp)	Pengeluaran Pemerintah Di Provinsi Papua (Rp)	Kemiskinan Di Provinsi Papua (%)
2010	110.808.000.000	5.803.839.000	34,01
2011	106.066.000.000	7.183.484.000	34,11
2012	107.890.000.000	8.241.636.000	30,66
2013	117.118.000.000	8.209.736.000	31,52
2014	121.391.233.000	11.315.078.000	27,80
2015	130.311.604.000	12.986.632.000	28,17
2016	142.221.091.000	13.071.335.000	28,54
2017	148.823.629.000	15.158.877.000	27,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Dari tabel 1 diatas dapat kita lihat data selama 8 tahun dari tahun 2010-2017 di provinsi Papua ada berbagai variasi dan dan terjadi secara fluktuatif. Masalah yang timbul pada angka (PDRB) yaitu ditahun 2012 dan 2013, dimana pada tahun 2013 angka (PDRB) sebesar Rp 117.118.000.000 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 angka PDRB sebesar Rp 107.890.000.000, namun peningkatan pada tahun 2013 timbulnya masalah pada angka kemiskinan yang meningkat, pada tahun 2012 angka kemiskinan mencapai 30,66% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 31,52%, sehingga timbulnya masalah pada tahun-tahun tersebut yang tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana teori menyebutkan bahwa ketika PDRB meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan(Mahsunah, 2013).

Pada tabel diatas angka yang jadi permasalahan ketika PDRB meningkat namun kemiskinan makin meningkat dikarenakan PDRB meningkat disebabkan karena sumber daya yang

dimiliki di provinsi Papua sangat baik dan melimpah, namun hasil penggunaan sumber daya tersebut tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat provinsi papua karena ada pembagian-pembagian khusus yang dilakukan oleh pusat untuk penghasilan yang diperoleh (Mahsunah, 2013).

Selanjutnya masalah yang timbul dari pengeluaran pemerintah adalah ketika pengeluaran pemerintah meningkat angka kemiskinan juga ikut meningkat. Dari tahun 2010-2017 angka pengeluaran pemerintah selalu meningkat tiap tahunnya, namun untuk angka kemiskinan terjadi penurunan dan peningkatan di tahun-tahun tertentu. Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa terjadi permasalahan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan timbul pada tahun 2010-2011 yaitu angka pengeluaran pemerintah tahun 2010 sebesar Rp 5.803.839.000 meningkat tahun 2011 menjadi Rp 7.183.484.000 namun angka kemiskinan juga meningkat dari tahun sebelumnya 34,01% menjadi 34,11%. Sehingga timbulnya masalah pada tahun-tahun tersebut yang tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana teori menyebutkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan (Mahsunah, 2013).

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian untuk mengetahui pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### PDRB

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode. (Sukirno, 2004).

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan nilai tambah yang dihasilkan dari produksi suatu negara dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

Hubungan antara variabel PDRB memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, dimana ketika angka PDRB meningkat maka akan menurunkan kemiskinan, karena ketika angka pemasukan akan lebih besar biasanya akan membantu mengurangi angka kemiskinan yang akan dibagi rata kesetiap masyarakat(Mahsunah, 2013).

Menurut penelitian (Mahsunah, 2013) PDRB adalah penambahannilai persektor dbaik dilihat dari harga konstan maupun harga berlaku.

Menurut penelitian (Dama, 2016) PDRB adalah nilai akhir barang dan jasa dihitung berdasarkan pesektor disuatu wilayah.

Kemudian penelitian dari(Permana, 2012) PDRB merupakan seluruh nilai akhir yang dihasilkan dari sektor ekonomi disuatu wilayah.

### Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator dari kebijakan fiskal, untuk mengatur jalannya pemerintah baik dalam bentuk pengeluaran maupun penerimaan di hitung dari anggaran APBN. (Sitiani pesy, 2013).

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam APBN atau APBD. (Subri, 2013)

Berdasarkan pakar diatas maka dapat diambil kesimpulan pengeluaran pemerintah adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada pihak pemerintahan untuk kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, dimana ketika pengeluaran pemerintah semakin tinggi maka akan mengurangkan kemiskinan, karena pengeluaran pemerintah diperlukan pada beberapa belanja diantaranya belanja konsumsi untuk masyarakat yang akan mampu meningkatkan kapasitas kehidupan seperti belanja pada beberapa sektor dan pemberian subsidi sehingga masyarakat sedikit tertolong dengan adanya pengeluaran pemerintah seperti hal tersebut maka akan mampu memerangi angka kemiskinan (Fithri, 2017).

### Kemiskinan

Kemiskinan adalah gambaran kekurangan materi, kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan maupun ketidakmampuan untuk berpartisipasi pada masyarakat dan gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai (Ellah, 2016).

Kemiskinan adalah keadaan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Bapennas, 2004).

Kemiskinan merupakan ketertinggalan dan penghambat dalam perekonomian suatu negara adalah tingginya angka kemiskinan (Aswandi, Hairul, & Kuncoro, 2002).

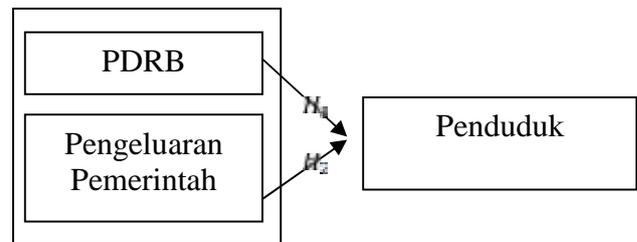
Berdasarkan teori para pakar diatas dapat kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merupakan masalah pemerintah yang harus dihadapi dan dituntaskan.

Menurut penelitian (Permana, 2012) kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mahsunah, 2013) kemiskinan adalah tidak ada dayanya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suryawati, 2005) kemiskinan adalah salah faktor ekonomi yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi akibat tidak adanya kesejahteraan hidup masyarakat didalamnya.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

### Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : PDRB berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua

$H_2$  : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua

## 3. METODE PENELITIAN

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui publikasi data yang dikeluarkan oleh BPS Indonesia selama 15 tahun dari tahun 2002-2017.

## Definisi Operasional Variabel

- PDRB ( $X_1$ ): PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan nilai tambah yang dihasilkan dari produksi suatu negara dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Skala ukuran yang digunakan dalam Rupiah.
- Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ): suatu kegiatan pemerintahan sehari-hari untuk proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Skala ukuran yang digunakan dalam Rupiah.
- Kemiskinan (Y): Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Skala ukuran yang digunakan dalam Persen (%).

## Metode Analisis data

Untuk memecahkan masalah pada penelitian ini maka penulis melakukan analisis data dengan memakai metode kuantitatif dengan menggunakan alat statistik yaitu program Eviews versi 10 yang berupa metode Regresi Linier Berganda (RLB) sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + e_i$$

Dimana : LogY = Kemiskinan

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi

Log $X_1$  = PDRB

Log $X_2$  = Pengeluaran Pemerintah

$e_i$  = Error Term

## Uji Normalitas

Uji normalitas dihitung untuk mengetahui hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera (J-B). Jika nilai *probability* dari statistik J-B lebih besar dari taraf kepercayaan 5% (0,05) berarti bahwa residu data berdistribusi normal begitupun sebaliknya (Widarjono, 2013).

## Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah antar variabel ada saling berhubungan atau mempengaruhi (Subri, 2013).

$R^2/k$  adalah koefisien determinasi ( $R^2$ ) berganda ketika  $X_k$  diregresikan dengan variabel-variabel  $X$  lainnya. Batas *Tolerance Value* adalah 0,01 dan batas *VIF* adalah 10.

Dimana :

*Tolerance value* < 0,01 atau *VIF* > 10 terjadi multikolinearitas

*Tolerance value* > 0,01 atau *VIF* < 10 tidak terjadi multikolinearitas

## Uji Autokorelasi

Tes autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi antar keadaan variabel gangguan (*disturbance*) pada periode tertentu dengan variabel gangguan (*disturbance*) pada periode lain. (Subri, 2013). Pendeteksian terhadap penyimpangan asumsi siklus untuk autokorelasi dapat dilihat pada besarnya nilai *Breusch-Godfrey Test*. Jika nilai *Obs. R-Squared* tidak signifikan maka data tidak terjadi autokorelasi.

## Pengujian Hipotesis

### Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial (Subri, 2013). Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- Jika  $t_{hit} > t_{t}$   $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  yang artinya variabel bebas (X) secara parsial mempengaruhi variabel terikat (Y).
- Jika  $t_{hit} < t_{t}$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  yang artinya variabel bebas (X) secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat (Y).

### Uji F

Uji F dilakukan untuk pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila uji F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2004). Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- Jika  $F_{hit} > F_{t}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  yang artinya variabel bebas

(X) secara simultan atau serentak berpengaruh signifikan variabel terikat (Y)

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  yang artinya variabel bebas (X) secara simultan atau serentak tidak berpengaruh signifikan variabel terikat (Y).

**Koefisien Korelasi (R)**

Menurut (Sugiyono, 2015) Koefisien korelasi (R) merupakan gambaran untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel yang dapat kita bandingkan dengan penelitian lain.

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

- >0,00 – 0,199 = sangat rendah
- >0,20 – 0,399 = rendah
- >0,40 – 0,599 = sedang
- >0,60 – 0,799 = kuat
- >0,80 – 0,99 = sangat kuat
- >1 = korelasi sempurna

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variansi dependen, dengan  $0 < R^2 < 1$ . Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. (Subri, 2013).

**4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Regresi Linier Berganda**

Untuk melihat hasil estimasi model penelitian data yang diolah dengan bantuan program Eviews versi 10 maka diperoleh hasil perhitungan analisis regresi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	154.9435	6.537208	0.0000
LOG(PDRB)	-4.839351	-2.455238	0.0303
LOG(P_P)	-0.035208	-0.014061	0.9890
R-squared	0.739998	F-statistic	17.07678
Adjusted R-squared	0.696665	Prob(F-statistic)	0.000309
		Durbin-Watson stat	1.533442

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

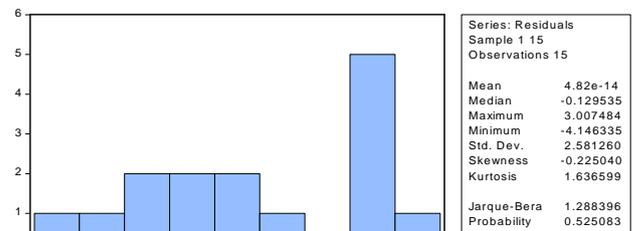
$$Y = 154.9453 - 4.839351L X_1 - 0.035208 L X_2$$

Nilai konstanta sebesar 154.9453 artinya jika variabel PDRB dan Pengeluaran Pemerintah bernilai nol, maka variabel dependen Kemiskinan sebesar 154.9453%.

Nilai koefisien regresi PDRB sebesar -4.839351 menunjukkan hubungan negatif yang berarti jika variabel PDRB meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan variabel Kemiskinan sebesar 4.839351%.

Nilai koefisien Pengeluaran pemerintah sebesar -0.035208 menunjukkan hubungan negatif yang berarti bahwa jika variabel pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan variabel kemiskinan sebesar 0.035208%.

**Uji Normalitas**



Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

**Gambar 2 Uji Normalitas**

Nilai  $X^2(C - S)$  tabel dengan  $df(2) = 5,99$ . Jika dibandingkan dengan nilai  $J-B$  pada tabel 4.4 sebesar  $1.28 < 5,99$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi, variabel pengganggu atau residual dalam model sudah terdistribusi dengan normal. Hal ini juga bisa dilihat dari probabilitas (P-value) sebesar  $0,52 > 0,05$ .

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3**  
**Uji Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	561.7746	1084.035	NA
LOG(PDRB)	3.884964	4536.651	5.607237
LOG(PP)	6.269895	6027.089	5.607237

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 begitu juga dengan hasil perhitungan yang dimiliki oleh nilai VIF menunjukkan nilai VIF < 10. Jadi dalam model ini tidak ada multikolonieritas karena antar variabel independen tidak saling berhubungan.

## Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 4**  
**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.006337	Prob. F(2,9)	0.0950
Obs*R-squared	5.632420	Prob. Chi-Square(2)	0.0598

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Dari hasil tersebut dilihat dari *obs\*R-Squared* <  $\chi^2$  (*Chi-Square*) tabel pada  $df(2) = 5,99$ , sehingga  $5,63 < 5,99$ . Hal ini juga bisa dilihat dari nilai *probability* (P-value) sebesar  $0,09 > 0,05$ .

## Pengujian Hipotesis

### Uji t

**Tabel 5**  
**Uji t**

Variabel Dependen (Pengeluaran pemerintah)				
Varibael Independen	T-Statistik	Prob	Keteranga	Hipotesis
PDRB	-2,455238	0,0303	Signifikan	Diterima
Pengeluaran Pemerintah	-0,014061	0,9890	Tidak Signifikan	Tidak Diterima

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Dari di atas dapat dilihat bahwa nilai  $t_{th}$  dari PDRB adalah sebesar -2,455238 dengan nilai signifikannya adalah 0,0303, sementara nilai  $t_{t_1}$  dengan  $(df) = n-k (15 - 3 = 12)$  pada  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai sebesar 2,17 artinya kecil dari derajat kesalahan sebesar 5% (0,05). Maka keputusanya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , yang berarti secara parsial PDRB berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua.

Selanjutnya nilai  $t_{th}$  dari Pengeluaran Pemerintah adalah sebesar -0,014061 dengan nilai signifikannya adalah 0,9890, sedangkan nilai  $t_{t_1}$  dengan  $(df) = n-k (15-3=12)$  pada  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai sebesar 2,17 artinya lebih besar dari derajat kesalahan sebesar 5% (0,05). Maka keputusanya menerima  $H_0$  dan menolak  $H_2$ ,

yang berarti secara parsial pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

### Uji F

**Tabel 6**  
**Uji F**

F-Statistik	T-tabel	Prob	Keterangan	Hipotesis
17,07678	6,93	0,000309	Signifikan	Diterima

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (data diolah)

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai  $F_{nit}$  sebesar 17,07678 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000309 pada taraf kepercayaan 99%. Sedangkan  $F_{t_1}$  dengan  $df = (n-k) (k-1) = (15-3) (3-1) = (12)(2)$  diperoleh nilai sebesar 6,93 pada  $\alpha = 1\%$  (0,01). Dengan demikian  $F_{nit} > F_{t_1}$ , yaitu  $17,07 > 6,93$  dan nilai signifikannya sebesar  $0,000 < 0,01$ . Dari hasil uji F ini berarti  $H_0$  diterima atau menolak  $H_0$ , dengan demikian PDRB dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di provinsi Papua.

### Koefisien Korelasi (R)

Nilai koefisien korelasi adalah  $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0,6966} = 0,8346$  (83,46%) yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan memiliki hubungan yang sangat kuat secara positif karena nilai korelasi 0,8346 mendekati positif satu (+1).

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R).

Adjusted R-Squared = 0,7399
-----------------------------

Maka koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,696665 yang artinya bahwa ada kaitan antar variabel bebas dan variabel terikat, perubahan yang terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 0,6966 (69,66%), sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini adalah sebesar  $1 - 0,6966 = 0,3034$  (30,34%).

## Pembahasan

### Pengaruh PAD Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa variabel PDRB ( $X_1$ ) berpengaruh secara negatif terhadap Kemiskinan (Y) dengan nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi angka PDRB ( $X_1$ ), maka akan menurunkan Kemiskinan di provinsi Papua. Hal tersebut dikarenakan angka PDRB yang disalurkan di provinsi Papua dapat digunakan semaksimal mungkin dengan baik sehingga dengan disalurkan angka PDRB tersebut mampu mempengaruhi dengan menurunkan angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dama, 2016) di Kota Manado, PDRB berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kota Manado dengan nilai signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Ini menunjukkan bahwa di Kota Manado semakin tinggi PDRB akan menurunkan angka Kemiskinan di Kota Manado.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Permana, 2012) di Jawa Tengah bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa di Kota Manado semakin tinggi PDRB akan menurunkan angka Kemiskinan di Jawa Tengah.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan (Y) dan signifikan sebesar  $\alpha=5\%$ . Hal ini bermakna bahwa jika pengeluaran pemerintah ( $X_2$ ) meningkat Rupiah, maka tidak akan menurunkan kemiskinan di provinsi Papua. Hal ini dikarenakan bahwa setiap pengeluaran pemerintah di Provinsi Papua tidak semua dikeluarkan untuk masyarakat namun ada sebagian yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang untuk kepentingan pemerintahan (Suparmoko, 2005).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dama (2016) di Kota Manado, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kota Manado dengan nilai signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Ini menunjukkan bahwa di Kota Manado semakin tinggi pengeluaran pemerintah tidak akan menurunkan angka Kemiskinan di Kota Manado.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2015) di Sulawesi Barat bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Sulawesi Barat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fithri, 2017) di Jawa Timur bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap

kemiskinan yang artinya apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur.

## **5 PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Hasil yang ditemukan variabel PDRB berpengaruh secara positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh secara negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua artinya semakin tinggi angka pengeluaran pemerintah maka juga tidak akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Papua.
3. Secara bersama-sama variabel PDRB dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua, dan besarnya PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan adalah sebesar 69,66% dan sisanya sebesar (1-69,66%) = 30,34% dapat dijelaskan di luar model penelitian ini.

### **Saran**

Adapun beberapa saran-saran yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya perbedaan teori ini dapat menambah wawasan kepada peneliti untuk memperluas wawasan dengan mencari jalan tentang kemiskinan yang diperoleh bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor di dalam penelitian ini, bahwasanya kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam penentu kemiskinan seperti kesehatan dan pendidikan.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar dapat membantu dan mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua, dengan memperhatikan variabel-variabel penting seperti peneliti lakukan yaitu variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan kemiskinan yang salah satu menjadi tolak ukur bagi pembangunan ekonomi di provinsi Papua.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan, sehingga diperoleh temuan yang lebih bervariasi dan lebih baik dalam menjelaskan variabel Kemiskinan dengan metode penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis, Vol 4 No.2*.
- Aswandi, Hairul, & Kuncoro, M. (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, vol 11, 75–89*.
- Bapennas. (2004). *Statistik Perhubungan*. Buku KeII Perpustakaan Bapenas.
- Dama. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No.*
- Ellah. (n.d.). Analisis Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan Sekitarnya 2003-2013. *Jurnal Ilmiah*.
- Fithri, N. dan D. K. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 15 No.*
- Indra Van, W. (2013). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*.
- Laporan Perekonomian Indonesia LPI 2016. (n.d.). *Bank Indonesia*.
- Mahsunah. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No.*
- Permana. (2012). Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Dipenogoro Journal If Economics, Vol 1 No.*
- Ratih, G. A. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayan, Vol 6 No.*
- Sitaniapessy. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economica, Vol 9 No.*
- Subri. (2013). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (P. R. G. Persada, Ed.). Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2003). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makro*. Jakarta: PT. Graha Grafindo.
- Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Multidimensional. *Jurnal Pelayanan Kesehatan, Vol. 8 No.*
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. Yogyakarta: Edisi Keempat.